



Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif dan Tantangannya di Sekolah Menengah Atas

Mia Leksmiani^{1✉}, Suherman², M Syadeli Hanafi³

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia^{1,2,3}

e-mail : 7772220004@untirta.ac.id¹, prof.suherman14@gmail.com², syadeli@untirta.ac.id³

Abstrak

Pendidikan inklusif bertujuan memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMA Negeri 2 Kota Serang, khususnya proses pelaksanaan, tantangan, dan faktor pendukungnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dari kepala sekolah, guru BK, guru mata pelajaran, wali kelas, siswa, dan orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini mencakup penerimaan siswa inklusif melalui PPDB, koordinasi antar pemangku kepentingan, dan pemberian informasi kepada guru. Tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pelatihan, sumber daya, dan pemahaman yang beragam di antara guru, serta keterbatasan fasilitas fisik yang belum sepenuhnya mendukung aksesibilitas siswa berkebutuhan khusus. Meskipun demikian, upaya menciptakan lingkungan psikologis yang inklusif telah dilakukan. Kesimpulannya, keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif memerlukan peningkatan pelatihan guru, keterlibatan aktif orang tua, serta penguatan kolaborasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Kata Kunci: pendidikan inklusif, kebijakan, aksesibilitas, pelatihan guru, keterlibatan orang tua

Abstract

Inclusive education aims to provide equal access to education for all students, including students with special needs. This study aims to analyze the implementation of inclusive education policies at SMA Negeri 2 Kota Serang, especially the implementation process, challenges, and supporting factors. The study used a descriptive qualitative approach with observation, interview, and documentation methods to collect data from the principal, BK teachers, subject teachers, homeroom teachers, students, and parents. The results of the study indicate that the implementation of this policy includes accepting inclusive students through PPDB, coordination between stakeholders, and providing information to teachers. The main challenges faced are the lack of training, resources, and diverse understanding among teachers, as well as limited physical facilities that do not fully support the accessibility of students with special needs. Nevertheless, efforts to create an inclusive psychological environment have been made. In conclusion, the successful implementation of inclusive education policies requires increased teacher training, active involvement of parents, and strengthening collaboration and communication between stakeholders.

Keywords: inclusive education, policy, accessibility, teacher training, parental involvement

Copyright (c) 2024 Mia Leksmiani, Suherman, M Syadeli Hanafi

✉ Corresponding author :

Email : 7772220004@untirta.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i6.7789>

ISSN 2656-8063 (Media Cetak)

ISSN 2656-8071 (Media Online)

PENDAHULUAN

Berawal dari kesenjangan yang muncul ketika anak berkebutuhan khusus yang jumlahnya semakin banyak dan harus mengenyam pendidikan secara terpisah dengan anak normal, yakni di SLB yang terbatas, Padahal bahwa semua warga negara tanpa terkecuali berhak untuk mengenyam pendidikan. Maka dikeluarkanlah Kebijakan Permendiknas No.70 tahun 2009 Tentang Sekolah Inklusi (Rusmono, 2020). Permasalahan muncul terkait ketidaksiapan sekolah penyelenggara layanan Pendidikan Inklusi yang berakibat pada proses pembelajaran yang terkesan dipaksakan dan pada akhirnya hasil pembelajarannya pun tidak maksimal. Hal ini dibutuhkan evaluasi sejauh mana kebijakan pendidikan inklusi telah berhasil dalam mencapai tujuannya, serta mengidentifikasi hambatan utama dan sejauh mana pengalaman guru dalam memahami pendidikan inklusi ditingkat SMA agar proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus bisa maksimal

Setiap negara memberikan warganya kesempatan yang sama untuk menerima pendidikan dan apa saja yang harus dimasukkan dalam sistem pendidikan. Kemajuan suatu negara tergantung pada keberhasilan pengelolaan pendidikannya (Bahri, 2022). Semakin baik kualitas pendidikan yang ada, maka semakin besar pula potensi generasi muda untuk tumbuh kreatif dan inovatif di negeri ini. Pendidikan merupakan hak dasar setiap individu, termasuk anak berkebutuhan khusus. Meskipun hak ini diakui, tantangan muncul seiring dengan meningkatnya jumlah anak berkebutuhan khusus dan kesenjangan pendidikan, khususnya di sekolah menengah atas (SMA), yang harus diatasi.

Namun, penerapan kebijakan inklusi ini bukannya tanpa tantangan. Kurangnya kesiapan sekolah dalam memberikan layanan pendidikan inklusif merupakan permasalahan penting yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Dampaknya sangat terasa pada proses pembelajaran yang terkesan dipaksakan, dimana anak berkebutuhan khusus mencapai hasil belajar yang kurang optimal (Muhibbin & Hendriani, 2021). Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pendidikan inklusif pada tingkat SMA untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi pendidikan inklusif di tingkat SMA.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah akhirnya membuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, khususnya Pasal 15 tentang pendidikan khusus bagi ABK yang dilaksanakan secara inklusif (Sahrudin et al., 2023). Kebijakan ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pendidikan Inklusif, yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pembelajaran bersama dengan anak-anak normal lainnya (Riyadi et al., 2023)..

Ada beberapa permasalahan yang muncul ketika menerapkan konsep sekolah inklusif. Salah satunya adalah kurangnya kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif terkait perubahan kurikulum, pengembangan sarana dan prasarana sekolah, guru dengan keterampilan khusus, dan berbagai jenis permasalahan yang sangat kompleks. Oleh karena itu, agar konsep pendidikan inklusif dapat berfungsi secara maksimal, diperlukan kebijakan baru yang menetapkan standar bagi sekolah yang dapat menerapkan konsep tersebut. Penggunaan istilah 'sekolah inklusif' mulai diperkenalkan ketika Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta didik Difabel dan Potensi Intelegensi dan Bakat Khusus (Jannah et al., 2021). Pasal 1 mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai pemberian kesempatan kepada seluruh peserta didik yang menyandang disabilitas atau keterbatasan serta berpotensi memiliki kecerdasan atau bakat khusus untuk ikut serta dalam proses belajar mengajar di lingkungan pendidikan bersama dengan peserta didik lainnya.

Sekolah inklusif merupakan bagian dari strategi pemerataan dan pemberian layanan pendidikan sehingga anak berkebutuhan khusus dan anak biasa memperoleh pendidikan yang sama. Penyelenggaraan program pendidikan inklusif tidak memberikan perlakuan atau keistimewaan khusus kepada anak berkebutuhan khusus, namun menjamin mereka mendapatkan hak dan tanggung jawab yang sama dengan peserta didik reguler (Munajah et al., 2021). Pendidikan inklusif membawa tantangan baru bagi sekolah dan masyarakat, sehingga

kerjasama seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat akan mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Penerapan program sekolah inklusif bertujuan agar generasi penerus dapat menerima dan memaknai berbagai bentuk perbedaan serta menghindari diskriminasi dalam kehidupan masyarakat yang berbeda.

Konsep dalam pendidikan ABK mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan dengan konsep ruang lingkup anak luar biasa. Konsep pendidikan ABK menggunakan layanan yang lebih spesifik. Hal ini karena layanan memiliki hambatan yang melekat pada pembelajaran dan pengembangan akademik (*barier to learning and development*) (Sukomardojo, 2023). Misalnya saja bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, akselerasi kinerja dalam pembelajaran berbeda dengan peserta didik normal, hal ini juga mempengaruhi proses emosional dan kontrol sosial.

Permasalahan terkait dengan kurangnya kesiapan sekolah dalam memberikan layanan pendidikan inklusif, sehingga menyebabkan proses pembelajaran terkesan dipaksakan dan pada akhirnya menghasilkan hasil pembelajaran yang kurang optimal. Hal ini memerlukan penilaian sejauh mana intervensi pendidikan inklusif telah berhasil mencapai tujuannya, serta mengidentifikasi hambatan utama dan sejauh mana pengalaman guru dalam memahami pendidikan inklusif di tingkat lanjutan dan memastikan bahwa proses pembelajaran perlu dilakukan mungkin. Memaksimalkan dukungan terhadap anak berkebutuhan khusus.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi tinjauan untuk penelitian ini, pertama hasil penelitian yang dilakukan oleh Husnul Khotima pada tahun 2019 berupa jurnal yang berjudul “Analisis Kebijakan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Sekolah Inklusif” (Khotimah, 2019). Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut dapat mencapai asas pendidikan, namun permasalahan terkait rendahnya kesiapan penyelenggara layanan pendidikan inklusif di sekolah masih ada pada setiap orang. kebijakan mengenai keberadaan Sekolah Inklusif. Dalam penelitian ini, Husnul Khotimah menganalisis implementasi kebijakan pendidikan terkait Sekolah Inklusif berdasarkan Permendiknas No. 70 Tahun 2009. Temuan informasi menarik tentang upaya mewujudkan asas Pendidikan untuk Semua melalui Sekolah Inklusif. Persamaan menggunakan Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Perbedaannya adalah Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Peneliti menggunakan data sekunder dari literatur kebijakan, laporan penelitian, buku akademis, dan beberapa penelitian terdahulu tentang sekolah inklusif.

Kedua Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yessi Warminda dkk dipublikasikan dalam bentuk jurnal dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 70 kasus tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus dan berbakat di SMPN Kota Padang 2022” (Warminda et al., 2022). Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan inklusi di sekolah dan implikasi kebijakan terhadap hak anak dalam pendidikan inklusif. Persamaan penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaannya adalah lokasi penelitian.

Permasalahan anak berkebutuhan khusus sangatlah kompleks. Sistem pendidikan inklusif memegang peranan penting dalam sosialisasi dan perkembangan akademik anak berkebutuhan khusus. Dengan adanya sistem pendidikan inklusif ini, anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan di sekolah reguler sebagaimana anak normal lainnya (Mujiati & Yoenanto, 2023). Akan tetapi, masih banyak permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, khususnya pada jenjang pendidikan menengah, dan penyelenggaraan pendidikan inklusif belum mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pedoman yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif dan Tantangannya di Sekolah Menengah Atas.”

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengungkap gejala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMA Negeri 2 Kota Serang (Ishtiaq, 2019). Sumber data mencakup informan, lokasi, peristiwa, dan dokumen. Informan terdiri atas kepala sekolah, 10 guru (termasuk guru BK, pengawas, dan guru mata pelajaran), 5 siswa, serta 5 orang tua siswa atau anggota komite sekolah. Dokumen yang digunakan mencakup foto, berkas, dan dokumen lain yang relevan dengan implementasi kebijakan pendidikan inklusif.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: observasi, untuk memahami konteks lapangan; wawancara, untuk menggali pendapat dan pengalaman informan secara mendalam; dan dokumentasi, untuk memverifikasi dan mendukung data yang diperoleh dari observasi dan wawancara (Wang et al., 2024). Ketiga teknik ini digunakan secara terintegrasi, di mana observasi dilakukan terlebih dahulu untuk mendapatkan gambaran awal, diikuti oleh wawancara untuk memperdalam pemahaman, dan dokumentasi digunakan untuk memastikan validitas temuan.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis tematik, di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema utama berdasarkan pola yang muncul dari data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini memberikan transparansi dalam mengelola data dan memastikan bahwa hasil analisis mencerminkan kenyataan di lapangan secara komprehensif. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu mengungkapkan tantangan, faktor pendukung, dan potensi perbaikan dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMA Negeri 2 Kota Serang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Menurut Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Serang, implementasi kebijakan pendidikan inklusif telah melalui beberapa tahapan penting, dimulai dengan penerimaan siswa inklusif melalui PPDB sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Setelah diterima, dilakukan identifikasi siswa inklusif melalui surat keterangan dari pihak terkait. Selanjutnya, terdapat kerjasama antara Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Guru BK, dan Wali Kelas untuk memberikan informasi kepada seluruh guru tentang pentingnya perhatian ekstra untuk siswa inklusif selama pembelajaran. Namun, meskipun dukungan dari kepala sekolah dalam hal interaksi dan keterlibatan aktif sudah baik, masih terdapat tantangan terkait kurangnya pelatihan dan sumber daya tambahan bagi tenaga pendidik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan perbedaan pemahaman terkait pendidikan inklusif di antara guru. Guru BK kelas X memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023, sementara guru BK kelas XII lebih mengacu pada Permendiknas No. 70 Tahun 2009. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh faktor pengalaman mengajar, jenis pelatihan yang diterima, serta pemahaman pribadi terhadap konsep pendidikan inklusif. Guru kelas X lebih terlibat dalam penerapan kebijakan inklusif, memberikan perlakuan setara untuk siswa ABK agar bisa mandiri. Sebaliknya, guru wali kelas XII menunjukkan kurangnya pemahaman dan penerapan kebijakan inklusif.

Dari data observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa guru mata pelajaran di SMA N 2 Kota Serang telah berinteraksi dengan siswa inklusif di kelas reguler, namun catatan dukungan individual bervariasi. Guru mata pelajaran kelas X menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep inklusi dan pentingnya perubahan pola pembelajaran bagi siswa inklusif. Sebaliknya, guru wali kelas XII menunjukkan pemahaman yang terbatas dan belum mendapatkan pelatihan tentang pendidikan inklusif.

Untuk meningkatkan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMA N 2 Kota Serang, disarankan agar: 1) Pelatihan dan sosialisasi yang lebih mendalam tentang pendidikan inklusif bagi semua guru. 2) Penyediaan pendamping khusus bagi anak berkebutuhan khusus. 3) Lingkungan sekolah yang menerima dan menghargai semua siswa tanpa memandang latar belakang atau kemampuan mereka. Wakil kepala sekolah

bidang kurikulum di SMA Negeri 2 Kota Serang telah berinteraksi dengan siswa inklusif di kelas reguler. Pengetahuan tentang peraturan pendidikan inklusif sudah ada, tetapi masih perlu ditingkatkan. Sosialisasi dan pelatihan telah diikuti, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pemberian perhatian khusus dan perubahan pola pembelajaran bagi siswa inklusif. Untuk meningkatkan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMA Negeri 2 Kota Serang, wakil kepala sekolah bidang kurikulum menyarankan agar dilakukan pelatihan yang lebih mendalam tentang pendidikan inklusif bagi seluruh guru, penyediaan pendamping khusus bagi anak berkebutuhan khusus, dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan guru dalam mengubah pola pembelajaran untuk mendukung siswa inklusif.

Keterlibatan dan pengetahuan orang tua tentang implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMA Negeri 2 Kota Serang; Orang tua siswa kelas X pada umumnya kurang memahami pendidikan inklusif dan peraturan terkait, serta kurang terlibat dalam kegiatan inklusif. Orang tua siswa kelas XII lebih memahami pendidikan inklusif dan peraturan terkait, tetapi masih kurang terlibat dalam kegiatan inklusif. Sedangkan untuk pandangan tentang Implementasi Inklusif; orang tua siswa kelas X melihat adanya upaya ke arah inklusi tetapi mengharapkan kontribusi nyata dari pihak sekolah. Orang tua siswa kelas XII melihat konsep inklusi masih kurang dan mengharapkan perhatian lebih dari pihak sekolah.

Saran untuk Peningkatan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMA Negeri 2 Kota Serang; orang tua siswa kelas X mengusulkan adanya penjelasan tentang program inklusif kepada orang tua dan komite sekolah. Orang tua siswa kelas XII mengusulkan adanya komunikasi yang baik antara guru dan orang tua untuk mengontrol anak inklusif. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap siswa tentang implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMA Negeri 2 Kota Serang, siswa kelas X dan XII berpendapat bahwa untuk meningkatkan partisipasi dalam kegiatan inklusif, sekolah perlu mendorong dan memfasilitasi keikutsertaan siswa berkebutuhan khusus dalam kegiatan lomba, bakti sosial, dan kegiatan inklusif.

Dalam hal peningkatan pemahaman tentang pendidikan inklusif, mereka berpendapat bahwa perlu adanya sosialisasi dan edukasi lebih lanjut tentang konsep pendidikan inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus di semua jenjang kelas. Dalam hal perlakuan dan dukungan khusus, sekolah perlu memberikan perhatian dan dukungan yang lebih kepada siswa berkebutuhan khusus terutama dalam hal perlakuan khusus dan adaptasi pembelajaran. Harapan Siswa Sekolah harus berusaha memahami dan menanggapi kebutuhan dan harapan siswa berkebutuhan khusus agar mereka merasa diterima dan mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Berikut adalah tabel hasil penelitian:

Tabel 1. Hasil Penelitian

Kategori	Subkategori	Temuan Utama	Saran Peningkatan
Guru	Mata Pelajaran Kelas X	Pemahaman baik tentang inklusi, perlu perubahan pola pembelajaran.	Pelatihan lebih mendalam.
	Wali Kelas XII	Pemahaman terbatas, belum ada pelatihan.	Pelatihan lebih mendalam, sosialisasi.
	Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum	Pengetahuan ada, perlu ditingkatkan.	Pelatihan lebih mendalam, penyediaan pendamping khusus.
Orang Tua	Kelas X	Kurang memahami, kurang terlibat.	Penjelasan tentang program inklusif.
	Kelas XII	Lebih memahami, kurang terlibat.	Komunikasi yang baik antara guru dan orang tua.
Siswa	Kelas X & XII	Ingin lebih terlibat dalam kegiatan inklusif.	Dorongan dan fasilitas untuk mengikuti kegiatan.
		Perlu sosialisasi lebih lanjut tentang konsep inklusi.	Sosialisasi dan edukasi tentang pendidikan inklusif.
		Perlu perhatian dan dukungan khusus.	Perhatian khusus, adaptasi pembelajaran.

Pembahasan

Penelitian ini menyoroti implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMA N 2 Kota Serang, dengan tujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi dan tantangan yang muncul. Data hasil wawancara dan observasi terhadap kepala sekolah, guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, orang tua siswa, dan siswa, serta kajian teoritis tentang implementasi kebijakan, menghasilkan beberapa temuan penting sebagai berikut:

Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif

Tahapan Implementasi: Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMA N 2 Kota Serang melalui tahapan-tahapan penting, mulai dari penerimaan siswa inklusif melalui PPDB sesuai jalur yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, penetapan siswa inklusif melalui surat keterangan dari pihak terkait, hingga koordinasi antar berbagai pihak di sekolah seperti wakil kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, BK, dan wali kelas. Informasi tentang siswa inklusif juga disampaikan kepada seluruh guru, meskipun belum ada pelatihan atau sumber daya tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah.

Tantangan dalam Implementasi: Dukungan kepala sekolah cukup baik, namun tantangan muncul dari kurangnya pelatihan dan sumber daya tambahan bagi staf sekolah, yang menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan sumber daya untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan inklusif secara keseluruhan. Perbedaan Pemahaman: Guru BK di SMA N 2 Kota Serang memiliki pemahaman yang berbeda-beda mengenai pendidikan inklusif. Guru BK kelas X memahami Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023, sedangkan guru BK kelas XII memahami Permendiknas No. 70 Tahun 2009. Meskipun ada upaya untuk mendukung siswa berkebutuhan khusus, sosialisasi dan pelatihan formal tentang pendidikan inklusif masih kurang. Perlunya Peningkatan Sosialisasi dan Pelatihan: Untuk meningkatkan implementasi kebijakan pendidikan inklusif, diperlukan sosialisasi, pendampingan khusus, monitoring berkala, dan evaluasi rutin dari berbagai pihak terkait. Interaksi dan Pemahaman Guru Kelas

Perbedaan Pemahaman: Guru kelas di SMA N 2 Kota Serang menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam pemahaman dan implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Guru kelas X memahami dan mengimplementasikan kebijakan inklusif lebih baik daripada guru kelas XII yang menunjukkan kurangnya pemahaman dan implementasi kebijakan inklusif. Perlunya Peningkatan Pengetahuan dan Pelatihan: Pengetahuan dan pelatihan lebih lanjut untuk semua guru kelas tentang konsep inklusi dan cara terbaik untuk mendukung siswa inklusif diperlukan untuk meningkatkan implementasi kebijakan pendidikan inklusif.

Interaksi Guru Mata Pelajaran

Perbedaan Pemahaman: Guru mata pelajaran di SMA Negeri 2 Kota Serang berinteraksi dengan siswa inklusif di kelas reguler, namun dukungan individual yang diberikan bervariasi. Guru mata pelajaran kelas X menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep inklusi dibandingkan dengan guru mata pelajaran kelas XII. Salah satu penyebab perbedaan ini adalah frekuensi pelatihan yang diberikan. Guru kelas X lebih sering mendapatkan pelatihan terkait pendidikan inklusif, sedangkan guru kelas XII belum mendapatkan pelatihan yang memadai. Selain itu, perbedaan pengalaman mengajar juga dapat memengaruhi pemahaman mereka. Guru kelas X, yang memiliki pengalaman lebih lama dengan siswa inklusif, cenderung lebih terbiasa dengan pendekatan inklusif dalam pengelolaan kelas. Sebaliknya, guru kelas XII mungkin menghadapi kesulitan dalam mengelola kelas inklusif karena kurangnya pelatihan dan pengalaman langsung.

Pandangan Siswa

Peningkatan Partisipasi: Siswa kelas X dan XII berpendapat bahwa untuk meningkatkan partisipasi dalam kegiatan sekolah inklusif, lebih lanjut mengenai konsep pendidikan inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus di semua jenjang kelas. Sekolah juga perlu memberikan perhatian dan dukungan lebih kepada siswa berkebutuhan khusus, terutama dalam hal perlakuan khusus dan adaptasi pembelajaran.

Tinjauan Teoritis

Berdasarkan teori implementasi kebijakan publik oleh Van Meter dan Van Horn serta Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, implementasi kebijakan mencakup langkah-langkah untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dengan melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor (Ningrum, 2022). Edward III dan Grindle menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, komitmen, dan pengaruh birokrasi dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Mazmanian dan Sabatier juga menambahkan bahwa karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan variabel lingkungan memengaruhi keberhasilan implementasi (Dhoka et al., 2023).

Dalam konteks pendidikan inklusif, implementasi kebijakan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan holistik, melibatkan semua pemangku kepentingan, dan berfokus pada peningkatan kapasitas dan sumber daya (Hidayati & Warmansyah, 2021). Tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pelatihan dan sosialisasi, serta perlunya upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi semua staf sekolah, orang tua, dan siswa. Penelitian ini menyoroti dukungan pemangku kepentingan seperti kepala sekolah, pendidik (guru), orang tua (komite sekolah) dan siswa di SMA N 2 Kota Serang, dengan tujuan memberikan dampak yang signifikan terhadap proses implementasi kebijakan pendidikan inklusif dan kajian teoritis tentang dukungan pemangku kepentingan, yang beberapa di antaranya menghasilkan temuan penting sebagai berikut:

Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SMA N 2 Kota Serang, kepala sekolah secara aktif mendukung implementasi kebijakan pendidikan inklusif meskipun tanpa promosi langsung terkait budaya inklusif. Kepala sekolah berinteraksi langsung dengan orang tua siswa berkebutuhan khusus dan menerima masukan dari mereka. Kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti Yayasan Anak Mandiri (YAM), mencerminkan kerja sama yang signifikan dalam mendukung siswa inklusif. Langkah ini juga akan menjadi lebih efektif jika sekolah membangun fasilitas sekolah yang ramah untuk anak berkebutuhan khusus.

Dalam teori tertua dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Yunaini, 2021), kepala sekolah memiliki peran penting sebagai penggerak utama dalam implementasi kebijakan inklusif, dengan tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan anggaran yang memadai, seperti komidi putar dan penyediaan fasilitas pendukung (Sukadari, 2020). Peran Guru BK dalam Mendukung Pendidikan Inklusif Data menunjukkan adanya perbedaan mencolok dalam peran Guru BK di kelas X dan XII. Guru BK Kelas X lebih aktif dan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung siswa inklusif, sedangkan guru BK Kelas XII cenderung memiliki pendekatan yang lebih pasif. Secara teori, guru BK (termasuk guru pembimbing lainnya) diharapkan untuk mendukung filosofi inklusif dan bekerja sama secara efektif dalam proses pembelajaran dan penilaian. Kolaborasi antara guru BK, guru mata pelajaran, dan staf sekolah sangat penting dalam mencapai keberhasilan pendidikan inklusif.

Dukungan Guru Kelas dalam Pendidikan Inklusif

Guru kelas di kelas X dan XII menunjukkan kerja sama yang baik dengan staf sekolah dan interaksi aktif dengan orang tua siswa inklusif, meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan komunikasi. Guru kelas X lebih menekankan pada panggilan konsultasi, sedangkan guru kelas XII berfokus pada komunikasi yang berkelanjutan. Secara teori, peran guru kelas konsisten dengan guru umum yang diharapkan terbuka terhadap filosofi inklusif dan bekerja sama dengan GPK dan orang tua untuk mendukung keberhasilan siswa inklusif. Peran Guru Mata Pelajaran dalam Pendidikan Inklusif

Guru mata pelajaran kelas X lebih aktif berinteraksi dengan orang tua siswa inklusif dibandingkan guru mata pelajaran kelas XII, hal ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat komitmen dalam melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif. Teori tersebut menekankan pentingnya kolaborasi antara guru umum (guru mata pelajaran) dan GPK dalam mendukung siswa inklusif melalui pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan siswa.

Peran Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dalam Pendidikan Inklusif

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 2 Kota Serang telah melakukan upaya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, meskipun interaksi langsung dengan orang tua masih perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan teori yang menekankan bahwa keterlibatan orang tua dalam pengembangan kurikulum inklusif merupakan elemen kunci.

Tantangan Sosial bagi Siswa Inklusif

Meskipun dukungan dari guru dan staf sekolah dirasakan positif, namun masih terdapat tantangan dalam hal interaksi sosial dan penerimaan oleh teman sekelas, terutama di kelas XII. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan sosial masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Menguraikan kepastian aksesibilitas fisik dan psikologis bagi siswa berkebutuhan khusus sebagai bagian dari lingkungan belajar inklusif di sekolah menengah atas.

Penelitian ini menyoroti kepastian aksesibilitas fisik dan psikologis bagi siswa berkebutuhan khusus sebagai bagian dari lingkungan belajar inklusif di sekolah menengah atas. di SMA N 2 Kota Serang, dengan tujuan untuk memberikan kepastian aksesibilitas fisik dan psikologis bagi siswa berkebutuhan khusus serta kajian teoritis tentang kepastian aksesibilitas fisik dan psikologis bagi siswa berkebutuhan khusus, sehingga menghasilkan beberapa temuan penting sebagai berikut:

Berdasarkan hasil analisis observasi dan wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMA N 2 Kota Serang masih dalam tahap pengembangan, dengan berbagai tantangan yang perlu diatasi. Aksesibilitas Fisik: Studi ini menunjukkan bahwa aksesibilitas fisik bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah ini masih terbatas. Meskipun ada upaya dari pihak sekolah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya aksesibilitas psikologis, namun fasilitas fisik yang memadai, seperti lapangan miring di beberapa area untuk lift, masih belum tersedia bagi siswa yang membutuhkannya. Hal ini sejalan dengan pedoman Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2023) yang menekankan pentingnya penyediaan aksesibilitas fisik yang memadai bagi siswa penyandang disabilitas. Aksesibilitas Psikologis: Meskipun aksesibilitas fisik belum optimal, SMA N 2 Kota Serang menunjukkan komitmen yang lebih besar untuk memastikan aksesibilitas psikologis. Guru BK dan wali kelas, khususnya di Kelas X, mengambil langkah aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung secara psikologis dan inklusif. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pendidikan inklusif yang menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk berpartisipasi penuh dalam lingkungan belajar yang inklusif (Angreni & Sari, 2020).

Variasi Pendekatan Guru: Terdapat perbedaan pendekatan antara guru BK, wali kelas, dan guru mata pelajaran di Kelas X dan XII. Guru BK Kelas X cenderung lebih proaktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung secara fisik dan psikologis, sedangkan guru BK Kelas XII lebih berfokus pada asesmen diagnostik dan koordinasi formal dengan orang tua. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan perlunya strategi pengembangan yang lebih konsisten dan terintegrasi untuk mendukung siswa yang inklusif di seluruh kelas.

Kolaborasi dengan Staf Sekolah: Kolaborasi antara guru, wali kelas, dan wakil kepala sekolah untuk kurikulum merupakan aspek penting dalam penerapan pendidikan inklusif di sekolah ini (Fauzan et al., 2021). Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum menunjukkan komitmen untuk memastikan aksesibilitas bagi siswa inklusif, meskipun kurangnya keterlibatan dalam penyusunan rencana pembelajaran inklusif merupakan tantangan yang perlu ditangani. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mendukung siswa inklusif, diperlukan perencanaan yang lebih komprehensif dan kolaboratif.

Peran Orang Tua: Keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan menunjukkan perbedaan antara kelas X dan XII. Orang tua siswa kelas X merasa lebih terlibat dan sering berkomunikasi dengan wali kelas dan guru BK, sedangkan orang tua siswa kelas XII merasa kurang terlibat dan melihat dukungan psikologis di sekolah tidak memadai. Hal ini menekankan pentingnya membangun komunikasi yang lebih efektif antara sekolah dan orang tua, terutama dalam mendukung siswa inklusif. Ingin menjelaskan tantangan utama yang dihadapi dalam

menerapkan pendidikan inklusif di sekolah menengah atas. Penelitian ini menyoroti kendala utama yang dihadapi dalam implementasi pendidikan inklusif di SMA N 2 Kota Serang, dengan tujuan memberikan dampak yang signifikan terhadap proses implementasi kebijakan pendidikan inklusif dan kajian teori mengenai kendala utama yang dihadapi dalam implementasi pendidikan inklusif di SMA menghasilkan beberapa temuan penting sebagai berikut:

Ketidaksesuaian Kurikulum dan Keterbatasan Kompetensi Guru

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah minimnya pemahaman dan keterampilan guru dalam menangani siswa berkebutuhan khusus (ABK), sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa guru sering mengalami kesulitan dalam penyesuaian kurikulum dan metode pengajaran (Mufidah et al., 2021). Selain itu, wakil kepala sekolah bidang kurikulum menegaskan bahwa tidak ada strategi khusus untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa inklusif, yang mencerminkan kurangnya perhatian terhadap pengembangan kurikulum inklusif.

Tidak Adanya Mentor dan Evaluasi Kurikulum

Tidak adanya mentor bagi siswa inklusif menjadi kendala yang cukup berarti. Teori menyatakan bahwa siswa berkebutuhan khusus membutuhkan dukungan individual dari mentor yang kompeten atau guru reguler (Ratna, 2009). Namun, di SMA N 2 Kota Serang, siswa inklusif tidak memiliki mentor, sehingga mereka kesulitan mengikuti pelajaran dan beradaptasi. Evaluasi kurikulum yang hanya dilakukan di akhir semester juga tidak memberikan solusi yang optimal untuk mengatasi kendala tersebut.

Hambatan Penerimaan Sosial dan Sosialisasi

Hambatan lain yang dihadapi siswa inklusif adalah penerimaan sosial dari lingkungan, baik dari siswa reguler maupun guru, seperti yang diungkapkan oleh guru BK. Teori mendukung bahwa integrasi sosial merupakan komponen penting dalam pendidikan inklusif (Sholeh, 2007). Di lapangan ditemukan bahwa meskipun terjadi sedikit peningkatan dalam adaptasi sosial siswa inklusif, namun prestasi akademik mereka masih menjadi tantangan utama.

Peran Orang Tua dan Kerjasama dengan Sekolah

Orang tua siswa inklusif di SMA N 2 Kota Serang merasa bahwa guru belum memberikan perlakuan khusus yang dibutuhkan untuk anak inklusif. Kajian teoritis menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua sangat penting bagi keberhasilan pendidikan inklusif (Setiawan dkk., 2020). Namun, keterlibatan orang tua di sekolah ini masih terbatas pada interaksi dengan wali kelas dan kepala sekolah, tanpa partisipasi yang signifikan dari guru mata pelajaran atau guru.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMA Negeri 2 Kota Serang menghadapi tantangan dalam hal pelatihan, sumber daya, serta pemahaman yang bervariasi di antara staf sekolah. Meskipun ada komitmen untuk mendukung aksesibilitas psikologis dan kolaborasi antar guru, aksesibilitas fisik bagi siswa berkebutuhan khusus masih perlu ditingkatkan. Temuan utama menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada peningkatan kapasitas guru, komunikasi yang lebih baik antara pemangku kepentingan, serta peningkatan peran orang tua dalam mendukung proses pendidikan inklusif. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang pentingnya koordinasi, pelatihan, dan fasilitas yang memadai dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif di tingkat SMA.

DAFTAR PUSTAKA

Angreni, S., & Sari, R. T. (2020). Identifikasi dan Implementasi Pendidikan Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Sumatera Barat. *Auladuna: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 7(2), 145–153.

- 6802 *Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif dan Tantangannya di Sekolah Menengah Atas - Mia Leksmiani, Suherman, M Syadeli Hanafi*
DOI: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i6.7789>
- Bahri, S. (2022). Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 94–100.
- Dhoka, F. A., Poang, F., Dhey, K. A., & Lajo, M. Y. (2023). Pendidikan Inklusi sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Sosial bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 1(1), 20–30.
- Fauzan, H. N., Francisca, L., Asrini, V. I., Fitria, I., & Firdaus, A. A. (2021). Sejarah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Menuju Inklusi. *Pensa*, 3(3), 496–505.
- Hidayati, W. R., & Warmansyah, J. (2021). Pendidikan Inklusi Sebagai Solusi dalam Pelayanan Pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus. *Aulad: Journal on Early Childhood*, 4(3), 207–212.
- Ishtiaq, M. (2019). Book Review Creswell, JW (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage. *English Language Teaching*, 12(5), 40.
- Jannah, A. M., Setiyowati, A., Lathif, K. H., Devi, N. D., & Akhmad, F. (2021). Model Layanan Pendidikan Inklusif di Indonesia. *Anwarul*, 1(1), 121–136.
- Khotimah, H. (2019). Analisis Kebijakan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Sekolah Inklusi. *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, 17(2).
- Muhibbin, M. A., & Hendriani, W. (2021). Tantangan dan Strategi Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi di Indonesia: Literature Review. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 4(2), 92–102.
- Mujiafiat, K. A., & Yoenanto, N. H. (2023). Kesiapan Guru dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusi. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(2), 1108–1116.
- Munajah, R., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(3), 1183–1190.
- Ningrum, N. A. (2022). Strategi Pembelajaran pada Anak Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan Inklusi. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(2), 181–196.
- Riyadi, S., Nuswantoro, P., Merakati, I., Sihombing, I., Isma, A., & Abidin, D. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Konteks Pendidikan Inklusif di Sekolah. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(3), 130–137.
- Rusmono, D. O. (2020). Optimalisasi Pendidikan Inklusi di Sekolah: Literature Review. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(2), 209–217.
- Sahrudin, M., Djafri, N., & Suling, A. (2023). Pengelolaan Pendidikan Inklusif. *Jambura Journal of Educational Management*, 162–179.
- Sukadari, S. (2020). Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus melalui Pendidikan Inklusi. *Elementary School: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Ke-SD-an*, 7(2).
- Sukomardojo, T. (2023). Mewujudkan Pendidikan untuk Semua: Studi Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah Volume*, 5(2), 205–214.
- Wang, T., Motevalli, S., & Lin, J. (2024). Unveiling the Transformative Influence: Qualitative Insights into Teachers' Innovative Work Behavior in Chinese Higher Education. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 23(1), 360–373.
- Warminda, Y., Hasrul, H., & Haryani, M. (2022). Implementasi Kebijakan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi ABK dan/atau Memiliki Bakat Istimewa di SMPN Kota Padang. *Jurnal Basicedu*, 6(6), 9989–10003.
- Yunaini, N. (2021). Model Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusi. *Journal of Elementary School Education (JOuESE)*, 1(1), 18–25.